



# Pancasila dalam Khazanah Arsip: Perspektif Sejarah

Susanto Zuhdi

TalkShow Arsip Nasional Republik Indonesia

Rabu, 1 Juni 2022



**RISALAH SIDANG  
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA  
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA  
(BPUPKI)**

**PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN  
INDONESIA  
(PPKI)**

28 MEI 1945 – 22 AGUSTUS 1945

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
1995**



**RISALAH SIDANG  
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA  
PERSIAPAN KEMERDEKAAN  
INDONESIA  
(BPUPKI)**

**PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN  
INDONESIA  
(PPKI)**

28 MEI 1945 - 22 AGUSTUS 1945

Dengan Kata Pengantar Oleh :

Prof. Dr. Taufik Abdullah

*Tim Penyunting*

Saafroedin Bahar

Ananda B. Kusuma

Nannie Hudawati

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
1995

Sidang Pertama

Rapat besar tanggal 1 Juni 1945

Waktu :

Tempat : Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Dep. Luar Negeri)

Acara : Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia (lanjutan)

Ketua : Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat

Anggota SOEKARNO :

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia ? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grondslag" daripada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan. Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan "merdeka".

Merdeka buat saya ialah : "political independence", politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata : Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati

# MEMORI KOLEKTIF BANGSA

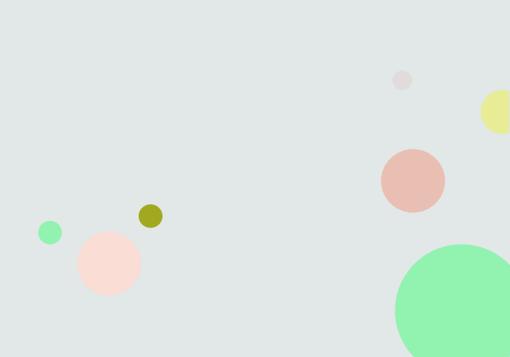
## PERSPEKTIF HISTORIS





Mari kita perbincangkan .....

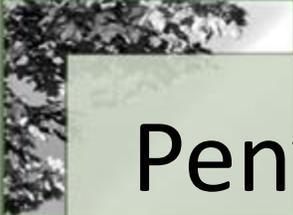
Terima Kasih





# PANCASILA





# Penyelamat Memori Kolektif Bangsa

- Arsip Nasional RI (ANRI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional
  - Arsip merupakan memori kolektif, identitas dan jati diri bangsa
  - Arsip adalah informasi publik yang autentik dan terpercaya
- 
- 

Yang dimaksud "arsip" dalam UU No. 43 Tahun 2009, pasal 1 ayat 2 adalah:

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam *berbagai bentuk dan media* sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang *dibuat dan diterima* oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

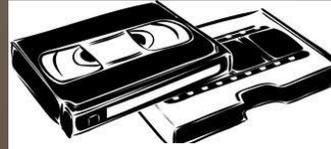
## Arsip Audio-Visual

### ARSIP ELEKTRONIK

## Arsip Image/ Gambar Statik



Arsip Film



Arsip Video



Arsip Audio



Arsip Mikrografik



Arsip Foto



Arsip Kertas



Arsip Peta

## Arsip Media Baru

## Arsip Konvensional



## 7 KHASANAHS ARSIP (28 nomor)

1. Arsip Muhammad Yamin ( 11 Nomor)
  2. Arsip Abdul Karim Pringgodigdo (6 nomor)
  3. Arsip Sekretaria Negara Seri Pidato Presiden Sukarno (3 nomor)
  4. Arsip Sekretariat Negara Seri Produk Hukum (3 nomor)
  5. Arsip Film PPFN Seri Pidato Sukarno (2 nomor)
  6. Arsip Film PPFN Seri Gelora Indonesia (1 nomor)
  7. Arsip Foto IPPHOS ( 2 nomor)
- 

~~ATJARA UPATJARA PEMBUKAAN "BADAN UNTUK  
MENJELIDIKI USAHA-USAHA UNTUK  
PERSIAPAN KEMERDEKAAN"~~

~~Pada hari Senin tanggal 28 bulan 5 tahun Syoowa 20~~

Djam	A t j a r a	Tempat	Keterangan
10.00	Upatjara pengibaran bendera Kokki dan bendera kebangsaan	Depan Gedung Tyuooo Sangi-in	Semua Iin2 dan Tokubetsu Iin dan pegawai2 kantor tata-usaha harus hadir.
14.45	Kedatangan Iin2 dan lain2nja jang bersangkutan.	Digedung Tyuooo Sangi-in	
15.20	Penjambutan P.J.M. Saikoo Sikikan oleh para hadirin	Serambi depan	Pegawai2 Gunseikanbu dan Zimukyoku serta para Iin dan lain2nja hendaklah ada diserambi depan untuk menjambut P.J.M. Saikoo Sikikan
15.30	Kedatangan P.J.M. Saikoo Sikikan		
15.35	(Upatjara pembukaan)		
	1. P.J.M. Saikoo Sikikan dan Gunseikan masuk keruang gedung.		Para hadirin memberi hormat kepada beliau
	2. Upatjara Kokumin Girei		
	3. Nasihat P.J.M. Saikoo Sikikan		
	4. Nasihat P.J.M. Gunseikan		
	5. Sumpah Iin		Sumpah ini akan diutjapkan oleh Kaityoo
	6. Utjapan selamat		Oleh seorang anggota Tyuooo Sangiin
	7. Pidato Kaityoo		
	8. P.J.M. Saikoo Sikikan meninggalkan ruangan.		
	9. Membikin poteret peringatan		
	10. P.J.M. Saikoo Sikikan berangkat diiringkan keluar.		Seperti peraturan menjambut beliau.

2                      8                      6                      8  
8/pt  
No. 82

# Arsip Muhammad Yamin

Arsip Personal  
Disimpan oleh Istri M. Yamin Ibu  
Rahadian Yamin kemudian di bawa ke  
Mangkuneragan Bapak Sanyoto  
Sutopo Kerabat Istana Kesunan  
Surakarta  
Tahun 1989 di serahkan Ke ANRI  
sebanyak 6 ml.

# Arsip AK Pringgodigdo

Algemene Secretarie  
1942-1945  
Deel III  
VI. Archiveria Van Raden  
Mas AK Pringgodigdo  
Secretaris van Staat vd RI  
1944-1945 (page 681)

AK. Pring  
NO. 4645

**獨立準備調査會議席表**  
**Peta tempat doedok persidangan Badan Oentok**  
**Menjelidiki Oesaha' Persiapan Kemerdekaan.**

60 Mr. R. Satrio- moeliono	59 Mr. R. Sam- sudin	58 Mr. A. A. Mearanis	57 Dr. Samal	56 Abdul Kadir	55 A. Baswedan
54 R. Oto Iskandar Dinata	53 Mr. K. R. M. T. Wongsoarsoro	52 Dr. Soeliman	51 P. F. Dahler	50 K. H. A. Washid Haslim	49 Mr. R. Soesandi
48 Drs. K. R. M. A. Soerodjiningrat	47 R. H. M. Mansoer	46 M. N. M. Sartono	45 Prada Harahap	44 Abdusoesno Tobroesoesno	43 Prof. Dr. R. Dinal Aalim Widjajaloesoema
42 Mr. A. Soe- bardjo	41 K. R. M. T. H. Wesjajalingrat	40 R. A. Soe- mitro Roesje- line	39 R. R. M. P. Soesoesman	38 Mr. Tan Eng Hoe	37 A. M. Deseadi
36 Hadji An. Soesni	35 R. Soesandjo Wiriponoto	34 Mr. R. Hindro- marsono	33 Mr. I. Lanu- harbary	32 Liem Keon Hian	31 Dr. R. Boetawan Mardoesmoedjo
9 K. H. Dewantara	5 R. Aris	4 R. Abdoechrhim Pretalyakrama	3 Dr. R. Koese- mah Almadia	2 Mr. Mohd. Yamin	1 I. Soekarno
12 Mr. R. Abbaroe- tejedjo Mecanadar	11 R. A. A. Wirja- natakoesoema	10 B. P. H. Poer- bojo	6 A. K. Moezakkar	8 B. P. H. Bintero	7 K. Boesno H. Hadikoesoema
18 R. M. Marsono Djiohadiloesoe- mo	17 M. Soetardjo Karto- hadikoesoema	16 H. Agoes Salim	15 Oei Tiong Huan	14 Drs. Moh. Hatta	13 Oei Tiang Tjoei
24 Prof. Ir. R. Roessao	23 Prof. Dr. Soepomo	22 Prof. Dr. P. A. H. Djiedjiningrat	12 R. Soedirman	20 K. H. Masjoe- koer	19 K. H. Abdul Halim
30 Ni. R. S. S. Soenarjo Mangoesoespito	29 Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo	28 R. Roelian Wongsoesoema	27 R. M. T. A. Soerjo	26 Mr. Ni. Maria Ulfa Santoso	25 Mr. R. Pandji Siagih

同會証  
Ketoesa moeda  
Dr. K. R. T.  
Radjiman  
Wedjodjiningrat

同會証  
Ketoesa  
Hibangase  
Yosio

同會証  
Ketoesa media  
R. P. Soereno

No. 5645

# ARSIP FOTO IPPHOS (Indonesia Press Photo Service)



Kantor Berita Pertama di Indonesia berdiri Tanggal 2 Oktober 1946 oleh alexius Inpurung Mendur dan Frans Soemarto Mendur  
Diserahkan ke ANRI Tahun 1975 dengan imbalan sebesar 2 juta

# Arsip Sekretariat Negara Seri Produk Hukum

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 66 TAHUN 1951  
TENTANG  
LAMBANG NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan Lambang Negara untuk Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Djuli 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

Pasal 1.

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda, yang menegok dengan kepalanja lurus ke sebelah kanannja;
2. Perisai berupa djantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Sembojan ditulis diatas pita yang dijengkeram oleh Garuda.

Pasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam pasal 6. Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih dan Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnya dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih dipakai pada ruangan perisai ditengah-tengah.

Pasal 3.

Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sajak, ekor dan tjakar menjunjukkan lambang tenaga pembangun.

Sajak Garuda berbulu 17 dan ekornja berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

Pasal 4.

Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk djantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan lukisannya (sanskrit).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing menjunjukkan dasar Pantja Sila:

- I. Dasar Ketuhanan yang Maha Esa berlukis dengan Hur Tjahaja dituangan tengah berbentuk bintang yang bersudut lima.
- II. Dasar Kerakjatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambang tenaga Rakjat.
- III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlinggung.
- IV. Dasar Peri Komunisan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan pasagi.
- V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran.

Pasal 5.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5.

Dibawah lambang bertulis dengan huruf Latin sebuah sembojan dalam bahasa Djawa-Kuno, yang berbunyi :

**BHINNEKA TUNGGAL IKA.**

Pasal 6.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti berlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memintalakan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan secepatnja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Oktober 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*[Signature]*  
SUKARNO  
PERDANA MENTERI,

*[Signature]*  
SUKIRMAN WILGOSAMADJO

Diumumkan  
pada tanggal 17 Oktober 1951.  
Menteri Sekretaris Negara,  
*[Signature]*  
M. A. PRATAPUSPA

LEMBARAN NEGARA No. 111 TAHUN 1951.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPINAN PADA  
PERATURAN PEMERINTAH  
No. 66 TAHUN 1951

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Warna:

Sebuah burung garuda, lambang Hur Tjahaja, kapas, padi dan rantai	=	lengkap emas
Ruangan perisai ditengah-tengah	=	merah-putih
Garis hitam dan latar belakang	=	merah
Kapas dan padi kiri bawah	=	putih
Dasar Hur Tjahaja dan bersekor perisai	=	hitam
Kapal Banteng	=	hitam
Pohon Beringin	=	hitam
Pita	=	putih
Band	=	hitam

Dijumlah helai bulu:

Pada kepala setiap	=	17
Pada ekor	=	8
Kapal Banteng perisai	=	19
Kapal Beringin	=	41

Perbandingan ukuran:

Dasar	a = b = 3
Dasar	c = d = 12
Dasar	e = f = 17 1/2
Dasar	g = h = 16
Dasar	i = j = 16
Dasar	k = l = 5
Dasar	m = n = 6
Dasar	o = p = 15 1/2
Dasar	q = r = 17

Penyerahan  
tahun 1998

# Pidato Sukarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945

rechtvaardigheid.

Kita akan bitjerekan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, didalam badan permusjawaratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Djuga didalam urusan kepala negara, saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oléh karena monarchie "vooronderstelt erfrelijkheid", turun-temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang Islam, saja menghen - deki mufakat, maka saja minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakkan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oléh rekjat? Tiap - tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, mendjadi kepala negara Indonésia, dan mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Hadikoesoemo dengan sendirinja, dengan otomatis mendjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oléh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonésia.
2. Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, - atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip jang kelima hendaknja:

Menjusun Indonésia Merdéka dengan bertakwa kepada Tuhan jang Maha Esa.

Prinsip K e t u h a n a n ! Bukan sadja bangsa Indonésia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonésia hendaknja bertuhan Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah

kita

- Arsip M Yamin No. 84
- Terdiri dari 30 halaman
- Judul Awal Kita Mendirikan Satu Negara Kebangsaan Indonesia
- Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan suku bangsa saja tapi berasal dari seluruh nusantara (4)
- Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dari bumi nasionalisme (7)
- Prinsip Kehidupan Bangsa Indonesia (12)
- Dasar Negara telah saya usulkan lima bilangannya(13)
- Pancasila, sila artinya azas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi(14)



# PANCASILA DALAM INGATAN KOLEKTIF BANGSA

---

Taufik Rahzen, Budayawan

01/06/2022

# INDONESIA

Interaksi manusia dengan alam dan para spesies penghuni kawasan Nusantara, telah melahirkan cara pandang budaya dan corak penghayatan spiritual khas yang disebut sebagai Bumintara. Bentuk penghayatan ini merata dan memiliki kaidah umum yang selalu muncul dari masa ke masa, dan terekam sebagai ingatan kolektif bangsa. Ia tampil dalam bentuk mitos, ujaran bahasa, motif seni, interaksi ekonomi dan tatanan sosial.

Betapapun Pancasila dirumuskan dalam cahaya perdebatan ideologi moderen abad XX, namun kita dapat menyusuri jejaknya pada masa jauh sebelumnya. Dengan menyingkap beberapa prasasti dan arkeologi-kesadaran yang tersebar, kita dapat memetakan lima kaidah umum.



# Kaidah Pertama

Peleburan antara diri, alam dan Yang-tak-terungkap. Semuanya terhubung dalam jaringan kehidupan yang disimbolkan dalam Pohon Hayat. Upaya memanjatkan doa dan kepasrahan pada kuasa bumi, menjadi ciri utama pengalaman spritual bersama. Beragam mitos dan narasi asal usul, senantiasa mengisahkan keragaman dan kesatuan, kekacauan dan keterpaduan : saling terhubung seluruh jaringan kehidupan. Kalpawreksa, Kalpataru, Batang Garing, Gunungan, Perahu Roh hingga pandangan sedulur papar lima pancer.



Pohon Hayat Prambanan

# Kaidah Kedua

Rasa dan bukan rasio sebagai pendekatan utama untuk memahami realitas. Rasa melahirkan tepa selira dan tenggang rasa atas kehadiran yang lain. Karenanya budi-daya lingkungan dicapai melalui pengolahan daya-budi manusia yang terus menerus. Kemanusiaan yang diselenggarakan secara adil dan beradab; merupakan hasil dialektika antara budi-daya dan daya-budi dalam ruang waktu.



Yupa Kutai

# Kaidah Ketiga

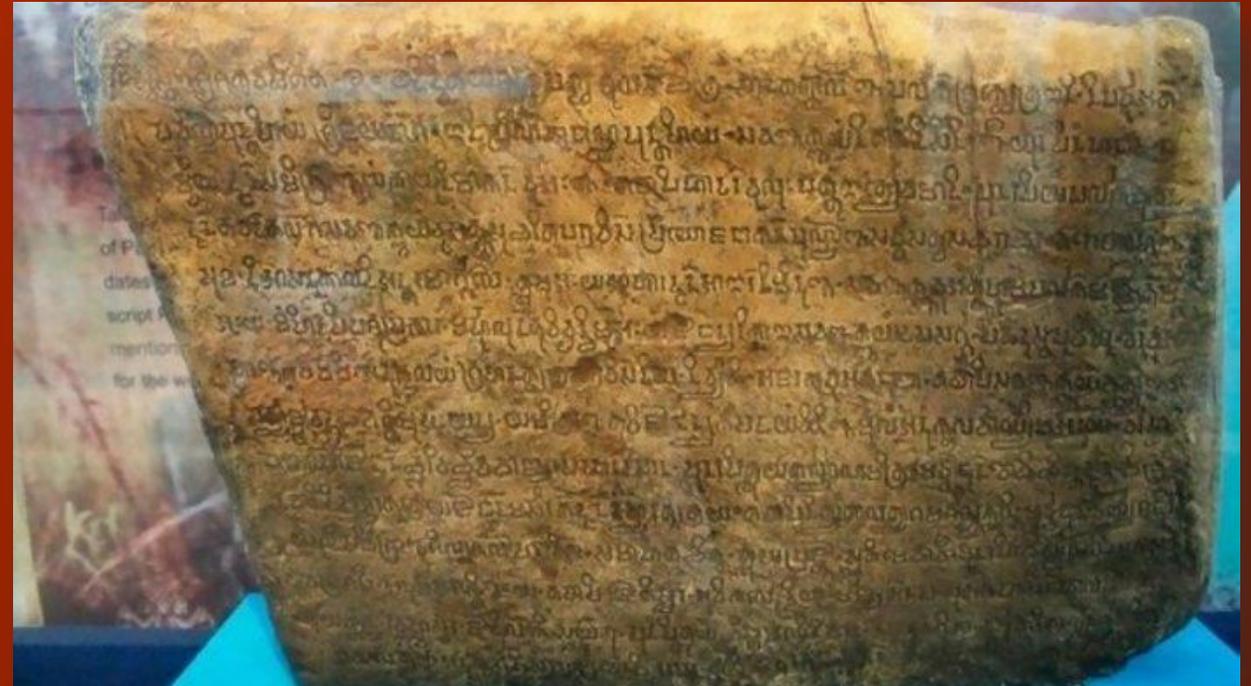
Daya bertahan hidup dicapai melalui kemampuan adaptasi dan kecerdasan dalam kerjasama. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling kuat, namun yang mampu berinteraksi. Gotong royong menjadi cara sekaligus tujuan keberadaan ; baik untuk melewati beragam bencana dan wabah maupun dalam menciptakan tatanan baru. Ikatan kebersamaan dicapai melalui "kerja" dengan mengolah alam dan "bakti" dengan memperkuat solidaritas bersama.



Prasasti Manjusri-graha Sewu

# Kaidah Keempat

Upacara merupakan wahana utama untuk menyelesaikan krisis. Melalui ritus sosial kenyataan diciptakan kembali, disegarkan dalam pertumbuhan bersama. Ritus lebih utama dari doktrin, karena upacara melampaui perbedaan dan sengketa. Setiap individu menyerahkan diri dalam komunitas, dan setiap komunitas melebur dalam upacara.



Prasasti Talang Tuo

# Kaidah Kelima

Kebenaran selalu hadir secara simbolik dalam bahasa lisan dan ragam visual. Karena kelisanan lebih utama dari tulisan (teks) dalam mengungkapkan yang sakral. Berbeda dengan komunitas tekstual, para penghuni Bumintara mempunyai hirarki bahasa yang kompleks, untuk berbagai tingkat komunikasi. Kebenaran diperoleh melalui percakapan dan belarasa, bukan melalui doktrin tunggal. Konteks lebih utama dari teks. Dengan demikian simbol perantara yang melampaui bahasa dibutuhkan untuk menyatukan pemahaman bersama.



GarudaMukha



Lima kaidah utama ingatan kolektif bangsa diatas, telah menjadi asas dan alas-wahana (platform) untuk hidup bersama. Taklah mengherankan jika ; lima kaidah utama ini telah tersirat dan tersurat dalam rumusan Pancasila. Penegasan berulang ulang Bung Karno bahwa Pancasila sesungguhnya digali dari kesadaran kolektif dan jiwa bangsa, kini memperoleh alasannya.



# Taufik Rahzen

Budayawan yang lahir di Sumbawa 1963. Sejak tahun 1982 mendirikan kelompok studi TeknoSUFU - TeknoSociety Unified Fundamental Ideas, yang kemudian berkembang sebagai gerakan IBUMI (1991) hingga sekarang. Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental dan pendiri Newseum Indonesia. Ketua Majelis Hikmah KITA (Kerapatan Indonesia Tanah Air).

